

**PERAN AL JAZEERA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK
ARAB SAUDI TERHADAP QATAR TAHUN 2017**

Oleh: Rosania Ayu Ningtyas

Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

rosania.ayu.2015@fisipol.umy.ac.id

Abstract

This thesis is about the role of Al Jazeera, a news media based in Qatar, in terminating the diplomatic relations of Saudi Arabia against Qatar in 2017. The termination illustrates the conflict between Saudi Arabia and Qatar. The conflict made Qatar experience a diplomatic crisis with its other neighboring countries. The interesting part is when Al Jazeera was in a vortex of the conflict and become one of the reasons for the diplomatic crisis. In this research, using role of media concept which is the agenda-setting agent by Steven Livingston for the analyzes. The concept explained about how media play the role that can influencing a government's policy. In this case, Al Jazeera carries out the agenda-setting agent concept by through emphasize its activities on the Arab revolution issue in 2011, which in the fact threatened Saudi Arabia. This is compounded by Qatar's full support for Al Jazeera's role, so that the termination diplomatic relations of Saudi Arabia with Qatar more reasonable.

Keywords: *Al Jazeera, Saudi Arabia, Qatar, diplomatic relations, media role, agenda-setting agent*

Abstrak

Skripsi ini ialah penelitian tentang bagaimana peran Al Jazeera, sebuah media berita yang berbasis di Qatar, dalam pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017. Peristiwa pemutusan hubungan diplomatik ini menggambarkan telah terjadinya konflik antara Arab Saudi dan Qatar. Konflik tersebut bahkan menjadikan Qatar mengalami krisis diplomatik dengan negara-negara tetangga lainnya. Yang menarik ialah ketika Al Jazeera berada dalam pusaran konflik dan menjadi salah satu alasan krisis diplomatik tersebut. Dalam penelitian ini dilihat dari konsep peran media *agenda-setting agent* oleh Steven Livingston yang menganalisis tentang bagaimana media bisa berperan memengaruhi sebuah kebijakan pemerintah. Dalam hal ini Al Jazeera menjalankan konsep peran media sebagai *agenda-setting agent* melalui penekanan aktivitasnya dalam isu revolusi Arab tahun 2011 yang nyatanya mengancam Arab Saudi. Ditambah adanya dukungan penuh Qatar terhadap peran Al Jazeera tersebut membuat pemutusan hubungan Arab Saudi terhadap Qatar semakin jelas beralasan.

Kata kunci: *Al Jazeera, Arab Saudi, Qatar, hubungan diplomatik, peran media, agenda-setting agent*

PENDAHULUAN

Al Jazeera merupakan sebuah organisasi media berita terbesar dan terpenting di Timur Tengah. Kehadiran Al Jazeera menjadi angin segar bagi orang-orang Arab. Karena secara tradisional, sebagian besar program diskusi di stasiun TV Arab tidak kontroversial, melainkan hanya berfungsi sebagai penghubung antara publik dan pemerintah (El-Nawawy & Iskandar, 2003, hal. 11). Al Jazeera semakin berkembang dan menjadi media berita yang terdepan melaporkan kejadian-kejadian di Timur Tengah. Salah satunya ialah *Arab Spring*, yang menjadi peristiwa monumental dalam sejarah di Timur Tengah. Peristiwa yang menjunjung ide revolusi Arab ini dimulai tahun 2011 yaitu *Arab Spring*. Peristiwa ini juga menjadi momen di mana terkotak-kotaknya negara-negara Arab di Timur Tengah yang kemudian menimbulkan gesekan cukup serius. Gesekan tersebut utamanya terkait dua pemeran yaitu Arab Saudi dan Qatar, yang mana gesekan itu memuncak menjadi krisis diplomatik Arab Saudi dan Qatar pada tahun 2017, dengan Arab Saudi yang memilih memutuskan hubungan diplomatik terhadap Qatar. Pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar ini juga kembali diikuti oleh negara-negara anggota GCC yang lain (Bahrain dan Uni Emirat Arab), bahkan juga dilakukan oleh beberapa negara lain di luar wilayah teluk. Menindaklanjuti tindakannya terhadap Qatar, Arab Saudi, bersama anggota GCC, memberikan 13 tuntutan yang harus dikabulkan oleh Qatar sebagai jalan untuk berdamai, dan salah satunya adalah Qatar harus menutup kantor pusat Al Jazeera.

Pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar ini disinyalir bahwa ada kaitannya dengan aktivitas Al Jazeera yang merupakan media berita berbasis di Qatar kala *Arab Spring*. Bahkan peristiwa tersebut dinilai sebagai *turning point* bagi Al Jazeera (Seib, 2017). Al Jazeera disebut sebagai sumber kekacauan di dalam kawasan tersebut (Harb & Batrawy, 2017). Berkaitan dengan hal di atas maka peneliti memberi batasan jangkauan waktu penelitian yaitu dari tahun 2011 yang merupakan pecahnya peristiwa *Arab Spring*, hingga tahun 2017 saat pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Dokumen. Menurut Hadari Nawawi Analisis Dokumen yaitu sebuah metode analisis sejumlah dokumen dari sekelompok populasi yang dilakukan untuk mengungkapkan aktivitas yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. (Nawawi, 1995). Penelitian ini berusaha untuk melihat peran-peran Al Jazeera yang terkait dengan alasan Arab Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar melalui literatur-literatur, yang sudah berhasil penulis coba kumpulkan, seperti buku yang menjelaskan

peran Al Jazeera di Timur Tengah. Penulis juga akan menganalisis konten-konten yang diunggah dalam media *online* milik Al Jazeera sebagai pelengkap sumber penelitian ini.

Teknik penelitian yang digunakan dalam memecahkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah dengan menggunakan Teknik Studi Dokumenter. Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui arsip-arsip peninggalan, termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum, juga bentuk lainnya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data menggunakan data-data dari buku-buku, jurnal, *website*, yang mana kesemua sumber tersebut dapat dipercaya dan mampu membantu dalam penelitian. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang didapatkan dari pihak-pihak kedua seperti data dari sebuah lembaga nasional dan atau lembaga swasta.

KERANGKA BERPIKIR

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep peran media *agenda-setting agent* milik Steven Livingston. Secara teknis, peran media sebagai *agenda-setting agent*, menurut Livingston, adalah ketika media mampu mempengaruhi agenda publik dengan cara memberikan porsi besar terhadap isu-isu yang dianggap penting oleh media. Maksud agenda publik dalam hal ini adalah sebuah isu yang patut mendapat perhatian lebih oleh publik, menjadi bahan diskusi publik, bahkan mendorong publik untuk melakukan sesuatu dalam hal isu tersebut. Dari definisi Livingston soal *agenda-setting agent*, media memiliki kemampuan untuk membuat publik berpikir bahwa ada sebuah isu yang patut diberi perhatian lebih oleh publik sehingga hasilnya publik pun berpikir demikian. Dalam hal ini media melakukannya dengan cara memberi penekanan pada laporan berita soal isu tersebut contohnya memberikan ruang besar kepada isu tersebut untuk selalu muncul di berita televisi atau di kolom utama berita. Livingston juga menjelaskan bahwa peran media sebagai *agenda-setting agent* ini tidak hanya berpengaruh terhadap agenda publik, tapi juga agenda kebijakan luar negeri suatu negara (Livingston, 1997). Liputan berita dari media terkait suatu isu, kemudian mengategorikan isu tersebut sebagai krisis, bisa mempengaruhi prioritas agenda kebijakan luar negeri suatu negara. Artinya mengarahkan pembuat kebijakan untuk menjadikan isu tersebut sebagai salah satu daftar isu yang harus ditangani, terlebih menjadikannya prioritas utama yang harus segera mendapatkan respon. Padahal bisa saja ada isu lain, yang memiliki dampak sama, tetapi tidak tercover oleh media sehingga tidak dianggap penting.

Konsep *agenda-setting agent* ini bisa diaplikasikan dalam kasus Al Jazeera karena Al Jazeera merupakan organisasi media berita yang populer baik di regional Timur Tengah, maupun secara global. Kepopuleran ini menggambarkan bahwa Al Jazeera memiliki jumlah audiensi yang banyak, terutama di regional Timur Tengah. Menurut survey Gallup Poll tahun 2002 yang dilakukan di sembilan negara, hasilnya mengatakan bahwa Al Jazeera telah ditonton secara luas. Secara umum dari hasil survey tersebut mengatakan bahwa Al Jazeera dianggap positif di negara-negara Arab (Powers & Gilboa, 2007). Kepopulerannya dikarenakan Al Jazeera merupakan satu-satunya media berita di Timur Tengah yang arah gerakannya secara terbuka membahas topik-topik sensitif dan pembahasan masalah yang kontroversial, salah satunya terkait isu politik. Sebelumnya, media berita atau pers di negara Arab hanya berperan sebagai lidah bagi pemerintah, sehingga sudut pandang berita hanya dari pemerintah. Media berita sebelum Al Jazeera juga tidak kontroversial dan tidak memihak pada publik, sehingga kehadiran Al Jazeera ini disambut positif dan penuh dukungan oleh publik di Timur Tengah. Kepopuleran Al Jazeera dan bagaimana arah gerakannya tentu bisa dirasakan bahwa Al Jazeera memiliki kemampuan berpengaruh di wilayah tersebut. Bukan hanya publik yang terpengaruh, pemerintah-pemerintah Arab juga bereaksi dengan apa yang dilakukan Al Jazeera.

ANALISIS

Al Jazeera resmi diluncurkan pada 1 November 1996 di Qatar kala masa pemerintahan Sheikh Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani. Al Jazeera terbentuk dari bekas sisa satelit milik BBC versi Arab yang diberhentikan oleh pemerintah Arab Saudi karena pemberitaannya dinilai tidak sesuai dengan Arab Saudi. Setelah penutupan BBC versi Arab tersebut, Sheikh Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani, yang kala itu menjabat menjadi emir Qatar, membeli satelit milik BBC versi Arab tersebut. Sheikh Emir Qatar pun kemudian mempekerjakan 120 mantan pekerja BBC versi Arab tersebut di negaranya yang kemudian mengoperasikan sebuah organisasi media berita bernama Al Jazeera. (Rushing, 2007, hal. 120-121). Al Jazeera memiliki kantor pusat di Doha, Qatar, namun secara operasional mereka bekerja secara lebih luas karena memiliki cukup banyak koresponden yang tersebar di seluruh wilayah negara-negara Arab. Sehingga berita yang dihasilkan bisa menjangkau seluruh publik di wilayah tersebut, baik dari segi isi maupun konsumen, tidak hanya terbatas satu negara.

Awal mulanya Al Jazeera hanya sebuah stasiun televisi berbahasa Arab yang fokus dalam menyiarkan berita dan menjadi saluran edukasi – terutama tentang sosial dan politik – bagi masyarakat Arab. Al Jazeera terus berkembang baik dari segi kualitas penyiaran, aksesibilitas ke publik (terutama melalui platform digital), bahkan kuantitas (dalam konteks

jumlah koresponden, jumlah wilayah sebar koresponden, dan juga jumlah kantor cabang atau biro Al Jazeera). Kini terhitung ada 57 biro Al Jazeera, yang aktif, di seluruh dunia. Semenjak kelahiran Al Jazeera, media ini sudah banyak meluncurkan berbagai macam program televisi. Ada yang masih berjalan hingga saat ini maupun tidak. Dari banyaknya program televisi Al Jazeera versi Arab ini, beberapa di antaranya cukup fenomenal dan kontroversial, seperti *The Opposite Direction*, *Without Borders*, *In the Depth*, dan *Talk of Revolution*. Satu saluran khusus milik Al Jazeera yang juga populer namun berbeda dari format acara televisi Al Jazeera lainnya ialah *Al Jazeera Mubasher*.

Al Jazeera bukan hanya sebagai media berita yang memiliki ruang lingkup regional bahkan internasional, tetapi juga media berita yang punya pengaruh terhadap berbagai aspek, khususnya politik. Al Jazeera membawakan politik ke dalam ruang televisi publik dan memengaruhi opini mereka. Dalam semua *talk show*-nya Al Jazeera tidak segan untuk membahas hal-hal seperti korupsi, catatan penyelewengan hak asasi manusia yang dilakukan rezim Arab, penganiayaan yang dilakukan terhadap pelaku oposisi pemerintah, hukum Islam (atau Syariah), fundamentalisme Islam, dan atau topik soal kesesuaian demokrasi dengan Islam. Bukan hanya demi mengisi kekosongan terhadap media berita yang mencerahkan publik, Al Jazeera juga hadir untuk mengisi kekosongan terhadap kesadaran politik serta pluralisme politik pada publik di Timur Tengah. Al Jazeera membuka ruang dan panggung untuk kelompok oposisi di wilayah tersebut demi menunjang kehadiran pluralisme politik. Al Jazeera menjadi media berita yang paling berani menyuarakan keraguan dan kritik terhadap otoritas pemerintahan negara-negara Arab, serta menentang wacana politik umum di wilayah tersebut. Al Jazeera tidak segan untuk membahas isu-isu sosial politik yang dianggap tabu oleh pemerintah. Dalam programnya, Al Jazeera bahkan berani mengekspos penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah negara Arab serta menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Arab yang tidak demokratis dan otokrasi menimbulkan kekecewaan publik yang meluas (Zayani, 2005, hal. 1-2). Dalam hal ini, Al Jazeera menunjukkan kepada publik, juga pemerintah, tentang bagaimana hambatan politik serta hambatan kebebasan berpendapat adalah menyengsarakan.

Dalam fenomena sosial dan politik di wilayah Timur Tengah paling tersorot di dunia, yaitu *Arab Spring*, Al Jazeera hadir di dalamnya dan memiliki intensi tersendiri. Bahkan bisa dikatakan Al Jazeera, yang telah mendorong terjadinya *Arab Spring* dengan cara mereka sendiri. Hal ini bisa dikatakan karena Al Jazeera menjadi media berita pertama dan satu-satunya di region yang meliput peristiwa besar tersebut, sehingga publik yang butuh informasi

terkait *Arab Spring* akan menyaksikan dan membaca liputan dari Al Jazeera. Selain itu, *Arab Spring* ternyata juga memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik domestik negara-negara di Timur Tengah yang mana hasilnya ialah tumbangnya beberapa rezim negara-negara Timur Tengah dan digantikan dengan rezim lainnya. Selain itu fenomena revolusi Arab ini telah berdampak pula pada hubungan politik regional antar negara, sebagaimana Al Jazeera pun memberikan dampak pada dinamika politik level regional ini. Bahkan berdampak terhadap hubungan diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi yang renggang. Sehingga dalam hal ini baik Al Jazeera maupun *Arab Spring* keduanya berdampak pada hubungan kedua negara tersebut. Dalam hal ini apakah bisa dikatakan Al Jazeera memiliki perannya sendiri dalam kerenggangan hubungan kedua negara bertetangga tersebut? Apakah bahkan berperan mengeskalasi konflik keduanya hingga terjadi pemutusan hubungan diplomatik tahun 2017 oleh Arab Saudi terhadap Qatar?

Peran Al Jazeera dalam Arab Spring dan Ancaman bagi Arab Saudi

Al Jazeera telah menjadi saksi mata bahkan menjadi bukti (melalui rekaman) bagaimana *Arab Spring* dimulai dan bagaimana gambaran keresahan masyarakat terhadap rezim yang otoriter memuncak. Memang benar bahwa tuntutan sosial adalah akar dari musim semi Arab, karena protes pertama di Tunisia dimulai dengan alasan sosial dan pada awalnya dipimpin oleh serikat pekerja setempat. Namun, aspek politik revolusi kemudian muncul, dengan tuntutan yang jelas yaitu untuk menggulingkan rezim. Slogan utama dalam *Arab Spring* tersebut ('Rakyat ingin menggulingkan rezim'), yang dirumuskan pada tahap awal revolusi Tunisia, dengan cepat menyebar ke Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Dalam situasi seperti ini, Al Jazeera telah hadir untuk siap melaporkan kepada dunia bagaimana kondisi di dunia Arab sebenarnya. Jurnalis dan penerjemah Mohammed Lemine mengatakan bahwa dengan adanya kehadiran Al Jazeera sangat berperan tidak hanya dalam segi melaporkan kisah tersebut tetapi juga, yang lebih penting, mempertahankannya (Abdelmoula, 2015, hal. 141).

Media-media arus utama di Timur Tengah tidak mampu untuk mengover isu ini baik karena kurangnya pengetahuan tentang media berita yang objektif maupun terkendala izin dari negara asalnya. Al Jazeera yang dari awal telah mendeklarasikan sebagai media berita independen, memiliki posisi yang strategis dalam hal mampu ikut terlibat dalam pertarungan publik terhadap ketidakadilan dengan cara meliputnya dan menyiarkan ke seluruh dunia. Termasuk keterlibatannya secara langsung pada hiruk pikuk gerakan revolusi Arab 2011.

Dalam hal ini Al Jazeera telah membuktikan bahwa keberpihakannya kepada publik adalah mutlak dan membuktikan pula bahwa Al Jazeera punya pengaruh terhadap opini publik.

1. Agenda-Setting Al Jazeera soal Isu Revolusi Arab 2011

Al Jazeera pada masa *Arab Spring* banyak mengarahkan pemberitaannya pada peristiwa tersebut, tidak terkecuali berita yang dirilis di situs berita resmi Al Jazeera yang berbahasa Arab, Aljazeera.net. Berikutnya dari tulisan ini akan melihat seberapa besar partisipasi dan peran Al Jazeera dalam isu revolusi Arab 2011 ini. Al Jazeera memiliki tujuan yaitu meliberalisasi media tradisional di Timur Tengah untuk menjadi sumber informasi tentang politik bagi publik yang tabu jika membicarakan soal itu. Dalam hal ini, pembicaraan terkait politik mendapatkan porsi yang banyak pada siaran Al Jazeera terlihat dari program politiknya. Dalam bentuk siaran televisi, Al Jazeera memiliki beberapa program televisi yang secara khusus membahas politik bahkan satu program khusus yang membahas terkait isu revolusi. Program-program tersebut ialah *The Opposite Direction*, *Without Borders*, *In the Depth*, dan satu program khusus tentang revolusi yaitu *Talk of the Revolution*.

Berdasarkan data yang dirangkum oleh Sam Cherribi dalam bukunya yang berjudul "*Friday of Rage: Al Jazeera, The Arab Spring, and the Political Islam*", Cherribi mengungkapkan bahwa pada rentang tahun 2011-2012 (yaitu pada masa peristiwa *Arab Spring* muncul dan menyita perhatian dunia), keempat program tersebut di atas banyak membahas soal isu *Arab Spring*. Untuk *The Opposite Direction*, program ini tercatat sebanyak 53 episode, dari total 71 episode yang tayang pada periode 2011-2012, yang membahas *Arab Spring* dalam rentang waktu hanya satu tahun. Bukan hanya itu, isu *Arab Spring* juga dibahas pada program televisi Al Jazeera lainnya. Seperti *Without Borders* yang tercatat menayangkan 44 episode dari total 73 episode yang tayang, *In the Depth* sebanyak 53 episode dari total 76 episode, dan terakhir *Talk of the Revolution* tercatat paling banyak yaitu ada 223 episode dari total 305 episode (Cherribi, 2017, hal. 28). Untuk jadwal penayangan program-program tersebut, *The Opposite Direction*, *Without Borders*, dan *In the Depth*, tayang dengan jadwal mingguan, sehingga setiap minggu hanya tayang satu episode. Berbeda dengan program *Talk of the Revolution*, program ini tayang setiap hari pada periode 2011-2012, bahkan sampai tayang sebanyak dua kali atau lebih dalam satu hari. Jika ditotal secara keseluruhan, selama periode waktu 2011-2012 Al Jazeera telah membahas isu soal revolusi Arab 2011 dalam 373 episode. Intensitas pembahasan isu revolusi Arab oleh Al Jazeera ini membuat isu revolusi dan peristiwa *Arab Spring* menjadi isu publik yang wajar diperbincangkan di tengah-tengah

masyarakat. Setidaknya, dalam hal ini, Al Jazeera telah menantang kultur tradisionalisme di Timur Tengah kala itu yang membungkam isu kontroversial terkait politik tersiar ke tengah-tengah masyarakat. Berikut beberapa contoh judul dari tayangan keempat program tersebut periode tahun 2011-2012.

Tabel 6. Judul Episode di Program Televisi Al Jazeera Tahun 2011-2012

Nama Program	No.	Judul Episode ¹	Tanggal Penayangan
The Opposite Direction	1	Arab Peoples are Revolting	11 Januari 2011
	2	Lebanon and Syrian Revolution	08 November 2011
	3	Keeping the Flames of Revolutions Burning	29 November 2011
	4	A Special Episode of Arab Revolutions	03 Januari 2012
	5	A Year of Egyptian Revolution	24 Januari 2012
Without Borders	1	The Future of the Syrian Revolutions	05 Oktober 2011
	2	The Role of Women in Arab Revolutions	12 Oktober 2011
	3	The Impact of the Arab Revolutions on the Palestinian Cause	01 Februari 2012
	4	Challenge Facing the Libyan Revolution	15 Februari 2012
	5	The Impact of Arab Revolutions on Central Asian Muslims	26 September 2012
In the Depth	1	Reason for the Start of Tunisian Revolution	24 Januari 2011
	2	Yemen: The Edge of Revolution	19 September 2011
	3	The League of Arab Revolution	06 Februari 2012
	4	Reform and the Arab Spring	14 Mei 2012
	5	Democracy in the Arab Spring Countries	30 Juli 2012
Talk of the Revolution	1	The Course of Revolutions and the Role of the Working Class	01 Mei 2011
	2	Developments of the Yemeni and Libyan Revolution	25 Juni 2011
	3	The Revolution in Tunisia	21 Juli 2011
	4	The Arab Revolutions	14 Januari 2012
	5	The Syrian Revolution between the Deficit of Observers and the Difference of the Opposition	17 Juli 2012

Tidak hanya disiarkan melalui televisi, Al Jazeera juga mengover isu revolusi Arab ini melalui situs berita *online*-nya. Ada sangat banyak berita yang dirilis oleh Al Jazeera terkait *Arab Spring*, berikut merupakan beberapa contoh judul berita oleh Al Jazeera dari tahun 2011-2012, yang diambil melalui situs resmi Al Jazeera².

Tabel 7. Judul Berita di Situs Al Jazeera Versi Arab selama tahun 2011-2012

¹ Judul-judul episode dari program televisi Al Jazeera tersebut diterjemahkan dari bahasa Arab. Sumber: aljazeera.net. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2019.

² Judul-judul berita diterjemahkan dari bahasa Arab dan diambil melalui aljazeera.net. Diakses pada 10 Oktober 2019.

No.	Judul Berita	Tanggal Rilis
1	Arab Popular Welcome to the Tunisian Revolution	16 Januari 2011
2	The Joy of Arab Popular Mubarak Departure	12 Februari 2011
3	Arab Appreciation of the Revolution of the Egyptian People	12 Februari 2011
4	The Revolution Takes the Arabs to New Stage	14 Maret 2011
5	Tahrir Square Uttered the Arab Revolution	03 April 2011
6	The Revolution of the Arabs and Turkey	07 Mei 2011
7	Arab and Turkish Revolutions	07 Juli 2011
8	Syrian Kurds with the Revolution	06 September 2011
9	Arab Revolutions Inspire the World's Youth	05 Oktober 2011
10	Haniyeh: Arab Spring Gave Victory to Gaza	22 November 2011
11	Tunisia: First Year of Revolution	14 Januari 2012
12	Sectarianism May Abort Arab Revolutions	29 Januari 2012
13	A Year After Syrian Revolution	15 Maret 2012
14	Syria National Revolution or Global Jihad?	18 Juni 2012
15	725 Palestinians Killed in Syria since Revolution	10 Desember 2012

Selama Al Jazeera melipit peristiwa *Arab Spring*, Al Jazeera menunda program-program rutinnnya agar biasa menayangkan siaran berita langsung dan wawancara terkait dengan peristiwa tersebut. Al Jazeera tidak hanya melipit satu peristiwa revolusi saja, tetapi terus beralih dari satu revolusi ke revolusi yang lainnya tanpa jeda. Sehingga tayangan Al Jazeera tiap harinya selama *Arab Spring* telah dipenuhi dengan topik revolusi Arab. Al Jazeera bahkan membuat sebuah saluran televisi khusus yaitu Al Jazeera Mubasheer Misr (AJMM). AJMM ini khusus menayangkan berita langsung terkait revolusi yang terjadi di Mesir, yang mana diluncurkan pada tahun 2011 bertepatan dengan munculnya fenomena *Arab Spring*. Selain itu, selama *Arab Spring* liputan Al Jazeera banyak diisi wajah-wajah para demonstran yang menyatakan tuntutan mereka kepada dunia. Para demonstran dan kaum revolusioner dalam aksi massa tersebut senang dengan kehadiran media yang berani seperti Al Jazeera, apalagi di tengah kontrol ketat pemerintah terhadap media untuk melipit peristiwa tersebut. Mereka bahkan memanfaatkan Al Jazeera untuk menjangkau dan memobilisasi orang-orang dari kalangan mereka (Hroub, 2011). *Arab Spring* pada akhirnya menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia bahkan telah mengejutkan hampir semua orang. Tidak lain dan tidak bukan, hal ini karena pengaruh Al Jazeera yang telah menjadi suara bagi orang-orang yang tidak pernah didengar suaranya di seluruh Timur Tengah.

Perjuangan Al Jazeera untuk bisa melipit demonstrasi yang terjadi selama masa *Arab Spring* patut dilihat intensinya sebagai bentuk partisipasi aktif Al Jazeera dalam isu tersebut. Al Jazeera mengakui bahwa selama terjadi *Arab Spring* pemerintah di beberapa negara – contohnya Tunisia dan Mesir – menutup biro mereka sehingga tidak akan ada berita baik di

tulisan maupun tayangan televisi yang muncul membahas terkait isu tersebut. Tetapi ternyata publik lebih pintar ketimbang para penguasa. Aktivitas daring oleh publik selama masa tersebut telah membantu Al Jazeera mendapatkan rekaman kejadian baik berupa foto maupun video sehingga Al Jazeera masih tetap bisa menampilkan apa yang terjadi. Para pemuda demonstran mengunggah foto dan video yang memperlihatkan beberapa potongan kejadian seperti pasukan keamanan pemerintah sedang menembaki massa demonstrasi damai, tubuh orang terluka bernoda-noda darah di jalan-jalan dan rumah sakit, bahkan tubuh orang yang mati (Sultan, 2013). Inilah yang kemudian menjadi bahan bagi Al Jazeera sehingga masih tetap bisa mewartakan ke publik terkait demonstrasi selama *Arab Spring* meskipun biro mereka ditutup. Termasuk yang terjadi pada awal mula *Arab Spring*, yaitu di Tunisia. Bakar diri secara dramatis dari Mohammad Boazizi – seorang pedagang buah – di Sidi Bouzid, Tunisia, pada awalnya tidak dilaporkan oleh media mana pun, karena sekali lagi semua media ditutup oleh pemerintah. Barulah ketika foto-foto bakar diri itu diunggah ke media sosial, topik tersebut mencuat ke permukaan dan menjadi bahan pembahasan di media, terutama Al Jazeera (Sultan, 2013).

Berbicara terkait demonstrasi di Mesir, Al Jazeera mengerahkan reporternya ke lapangan sebelum demonstrasi pertama terjadi dengan jumlah reporter yang banyak. Terutama demonstrasi yang terjadi di Tahrir Square, Mesir (Abdelmoula, 2015, hal. 149). Kepala biro Al Jazeera di Kairo saat itu, Abel Fattah Fayed, mengatakan bahwa biro Al Jazeera di Kairo tersebut sudah ditutup oleh pasukan polisi dari Hosni Mubarak, Presiden Mesir kala itu, pada tanggal 30 Januari 2011. Wartawan dan reporter Al Jazeera diusir dari biro tersebut dan pemerintah Mesir juga menyita kartu pers mereka. Hal ini dilakukan agar pemerintah kembali memiliki kendali terhadap berita yang muncul dan tersiar ke publik selama demonstrasi berlangsung. Meskipun biro Al Jazeera tersebut ditutup, Al Jazeera masih tetap bisa menyiarkan berita tentang demonstrasi yang terjadi di Kairo, Mesir. Hal ini kemudian disadari oleh pihak pemerintahan Mesir kala itu sehingga pihak kepolisian menjelajahi kota berusaha melacak kamera video Al Jazeera, bahkan memeriksa toilet di biro Al Jazeera Kairo untuk memastikan adakah kamera tersembunyi yang terpasang di sana. Fayed mengatakan bahwa meskipun Al Jazeera kesulitan untuk merekam kejadian demonstrasi di Tahrir Square, para pengunjung rasa bertindak sebagai koresponden dan reporter tidak resmi Al Jazeera dengan mengunggah foto-foto atau video-video yang berkaitan dengan demonstrasi saat itu di media sosial mereka, sama hal seperti yang terjadi di Tunisia. Rekaman melalui foto maupun video tersebut menjadi bahan bagi Al Jazeera untuk tetap menyiarkan perkembangan yang terjadi selama *Arab Spring* di Mesir dengan menambahkan narasi yang menarik. Ruang redaksi

seolah pindah dari gedung perkantoran ke jalan-jalan di kawasan Tahrir Square bersama para pengunjung rasa (Cherribi, 2017, hal. 127). Tidak hanya bekerja sama dengan warga para pengunjung rasa, Al Jazeera juga memutuskan untuk mencabut logo yang menempel pada peralatan mereka dan terus bekerja (Sultan, 2013).

Dari berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan oleh Al Jazeera bisa dilihat bahwa Al Jazeera memiliki misi sendiri. Sebagaimana pendapat Steven Livingston, media (dalam hal ini seperti Al Jazeera) mampu menjalankan peran sebagai *agenda-setting agent*, yang mana media berita memberikan porsi besar dalam liputan dan tayangannya terhadap isu-isu yang dianggap penting oleh media tersebut, kemudian isu tersebut menjadi sorotan publik – mencuri perhatian publik, dan pada momentumnya publik melakukan suatu aksi dalam menanggapi isu tersebut. Dari definisi tersebut, bisa dikorelasikan dengan apa yang dilakukan Al Jazeera dalam hal isu *Arab Spring*. Al Jazeera sangat memberikan ruang kepada isu revolusi Arab dalam fenomena *Arab Spring* 2011. Hal ini dibuktikan dengan tayangan dalam program-program televisi Al Jazeera dan liputan berita di situs resmi aljazeera.net didominasi oleh topik tentang demonstrasi dan gerakan revolusi Arab yang terjadi selama masa *Arab Spring*.

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Livingston, penekanan media berita terkait suatu isu menyiratkan bahwa sebuah isu dinilai penting oleh media tersebut yang pada momentumnya juga akan dianggap penting oleh publik sebagai konsumen dari tayangan dan tulisan berita tersebut. Dalam hal ini Al Jazeera menganggap bahwa isu revolusi Arab adalah isu penting yang penting untuk disebarkan ke publik secara luas. Semisal apa yang dilakukan oleh Al Jazeera dalam mengover dari kejadian protes pembakaran diri Mohammad Boazizi hingga demonstrasi di Tunisia. Bagi Al Jazeera yang memiliki cita-cita sebagai “*Voice of Voiceless*” (Al-Jazeera, 2019), isu tersebut penting untuk disebarkan kepada khalayak sebagai bentuk mendukung adanya partisipasi publik terhadap isu-isu sosial dan politik, bahkan ekonomi, yang mana sebelumnya itu hanya menjadi urusan pemerintah. Hal ini juga dibuktikan dengan bagaimana reporter Al Jazeera sangat berjuang dan berupaya demi bisa meliput demonstrasi masyarakat yang menjadi tanda meningkatnya kesadaran dan partisipasi publik terhadap isu-isu yang dikatakan tabu di wilayah tersebut. Pada momentumnya, isu-isu yang ditekankan oleh Al Jazeera akan juga menjadi isu penting bagi publik. Hal ini yang kemudian bisa dibuktikan dengan menjalarnya aksi protes dari Tunisia ke negara-negara lain di Timur Tengah. Sehingga dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa Al Jazeera telah menjalankan peran media sebagai *agenda-setting agent* pada peristiwa *Arab Spring*.

2. Arab Spring dan Al Jazeera: Ancaman bagi Arab Saudi

Arab Saudi termasuk dalam sekelompok kecil negara di Timur Tengah yang tidak terkena dampak signifikan dari *Arab Spring*. Bukan karena tidak ada upaya-upaya dari publik Arab Saudi untuk bisa menuntut pemerintah mereka, tapi karena pemerintah Arab Saudi cukup pandai meredam ‘berisik’ dari para demonstran. Tuntutan dari para demonstran sangat beragam. Ada yang menuntut agar Arab Saudi membebaskan tahanan politik yang tidak bersalah, menuntut hak perempuan, protes terhadap pemerintah yang korup, protes terhadap pengangguran, protes terhadap perlakuan anti-Syiah, dan lain sebagainya. Protes tersebut dimulai pada Januari 2011 ditandai dengan protes bakar diri seorang lelaki paruh baya berumur 60 tahun di Samitah, Arab Saudi (BBC, 2011), persis dengan cara protes pionir gerakan revolusi Arab, Boazizi, di Tunisia.

Demonstrasi yang memakan korban, keburukan rezim yang tersebar ke publik dunia, serta kegagalan dalam mengontrol masifnya demonstrasi massa yang berujung penggulingan rezim, jelas sangat tidak diharapkan oleh pemerintah Arab Saudi bahkan sangat dihindari. Hal ini dikarenakan *Arab Spring* mengancam posisi Arab Saudi sebagai kekuatan regional di Timur Tengah. Sehingga demi menjaga posisi sebagai kekuatan regional tersebut, Arab Saudi perlu untuk membuat dan menjaga stabilitas keseimbangan sistem yang berjalan di wilayah regionalnya dengan menjaga segala kekuatan yang ada (Richter, 2014, hal. 177-187), termasuk meredam kekuatan publik yang secara konsep berseberangan dengan kekuatan pemerintah atas publik. Dalam hal ini Arab Saudi memiliki tujuan utama dalam kebijakan luar negerinya terhadap negara-negara regional, yaitu mencegah munculnya kekuatan baru dalam subregional Timur Tengah dengan cara mengatur antara potensi ancaman dan tantangan dalam tingkatan regional, bahkan secara global dengan cara menstimulasi. Arab Saudi juga memperhatikan kebijakan dalam negerinya, karena ancaman untuk pergeseran posisi Arab Saudi sebagai kekuatan juga mungkin terjadi dikarenakan ancaman-ancaman domestik. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa Arab Saudi negara yang kuat dan memiliki dominasi yang sulit tergeser.

Menghindari ancaman kekuatan baru dari tingkat domestik dan regional, Arab Saudi menganggap penting berada pada posisi sebagai negara kontra-revolusi. Jikalau Arab Saudi mengiyakan revolusi maka Arab Saudi telah mengakui kehadiran kekuatan baru yang mempengaruhi dominasinya. Wajar jika Arab Saudi sangat ketat mengontrol kekuatan lain yang akan muncul melalui ide-ide revolusi, contohnya seperti peristiwa *Arab Spring*. Arab

Saudi sangat menutup kesempatan dan membatasi adanya ide bahkan aktivitas yang reformis. Sering kali aktivis-aktivis reformis dipenjara, baik itu yang datang dari kaum intelektual, penulis, *blogger*, termasuk orang-orang yang hanya menulis surat kepada raja meminta reformasi dilaksanakan. Termasuk Arab Saudi juga membatasi aktivitas media dan pers. Arab Saudi berupaya menjaga agar sistem regional tetap stabil dengan memberi dukungan dana maupun militer kepada negara-negara – sahabat – di Timur Tengah yang terdampak gelombang protes *Arab Spring*. Misalnya Arab Saudi memberikan dukungan berupa dana bantuan darurat hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat (AS) kepada Bahrain dan Oman, sebagai upayanya mempertahankan basis kekuasaan monarki tradisional dalam GCC. Kemudian Arab Saudi juga memberikan dana darurat sebesar 5 miliar dolar AS kepada junta militer di Kairo, setelah Mohammad Morsi terpilih sebagai presiden Mesir (Richter, 2014). Hal ini jelas dilakukan oleh Arab Saudi untuk menurunkan pengaruh Ikhwanul Muslimin dari kekuasaan di Mesir.

Karena menyadari ancaman terhadap stabilitas kekuasaan di tingkat domestik juga ada selama *Arab Spring*, Arab Saudi merespons sama dengan apa yang dilakukan pada tingkat regional, yaitu dengan memobilisasi semua sumber daya yang tersedia Arab Saudi memberikan bantuan dana. Pertama-tama Arab Saudi merespons aksi demonstrasi yang menuntut pemerintah Arab Saudi dengan memberikan dana sekitar 37 miliar dolar AS bagi sektor masyarakat yang paling rentan atau berpotensi memberontak. Sektor tersebut seperti kaum muda dan orang miskin. Lowongan pekerjaan diciptakan dan subsidi untuk perumahan disediakan. Tidak hanya sekali, Arab Saudi menggelontorkan dana lagi, bahkan yang lebih besar jumlahnya, sebulan setelah bantuan pertama. Yaitu sebesar 93 miliar dolar AS, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan juga memberikan gaji ekstra untuk pegawai negeri (Lacroix, 2014). Arab Saudi juga memukul mundur mereka yang mengancam. Beberapa aktivis yang ikut dalam demonstrasi di Arab Saudi ditahan oleh pihak keamanan pemerintah, dan beberapa lainnya diancam akan ditangkap jika mereka mengumumkan dukungan kepada gerakan-gerakan membangkang pemerintah. Polisi berada di jalan-jalan dalam jumlah yang sangat besar, dan pos-pos pemeriksaan didirikan untuk mencegah siapa pun yang berani mencoba mencapai lokasi di mana demonstrasi terjadi. Intelijen Saudi juga aktif di internet. Menurut beberapa aktivis yang menggunakan media sosial Facebook, beberapa halaman Facebook telah dihancurkan, sementara beberapa akun diretas (Lacroix, 2014).

Al Jazeera yang pada kenyataannya memang menjalankan peran media sebagai *agenda-setting agent* dalam isu revolusi Arab selama Arab Spring, cukup mengganggu dan

mengancam posisi Arab Saudi sebagai kekuatan regional. Al Jazeera melalui berbagai aktivitasnya di awal mula kemunculan *Arab Spring*, yaitu aksi protes masyarakat di Tunisia, telah menjadi ‘bubuk mesiu’ dan menghasilkan aksi protes dengan massa yang lebih besar. Bahkan aksi tersebut ditiru oleh publik negara lain demi menuntut rezim di negara mereka yang juga tidak memimpin dengan adil sebagaimana rezim di Tunisia. Hal ini yang kemudian membuat Arab Saudi kemudian sangat menolak bahkan membenci Al Jazeera.

Penolakan Arab Saudi terhadap Al Jazeera tidak mulai terjadi pada fenomena *Arab Spring* 2011, bahkan dari jauh sebelumnya. Al Jazeera di awal-awal kemunculannya dikritik oleh para pejabat Arab Saudi melalui pers Arab Saudi dengan kritik yang ganas. Pejabat Arab Saudi tersebut mengkritik program Al Jazeera yang memuat isu-isu Islam, Nabi Muhammad, dan Al Qur’an dengan format yang sangat berani. Hal tersebut telah memancing kemarahan para intelektual di Arab Saudi. Pada 14 Maret 1998, dua tahun setelah kelahiran Al Jazeera, seorang ulama terkemuka di Arab Saudi menulis tanggapannya soal Al Jazeera dalam sebuah surat kabar harian Arab Saudi (yang kebetulan memiliki nama Arab yang sama dengan Al Jazeera). “Bagaimana bisa pejabat Al Jazeera mengizinkan serangan terhadap agama Islam dan Al Qur’an ditayangkan secara langsung kepada pemirsa? Berani-beraninya program Al Jazeera menjamu seorang ateis untuk berbicara tentang agama suci kita dan menjadikannya lelucon atas nama kebebasan berbicara? Bisakah Anda bayangkan apa dampak semua yang akan terjadi pada anak-anak Arab dan Muslim? Bisakah Anda bayangkan pengaruhnya terhadap pemirsa yang tidak memiliki informasi tentang agama dan budaya Islam?”.

Arab Saudi berupaya untuk menghentikan, atau setidaknya melemahkan, pengaruh Al Jazeera, mulai dari larangan bagi perusahaan di Arab Saudi untuk beriklan di Al Jazeera, menolak didirikannya biro Al Jazeera di Arab Saudi, bahkan menarik duta besar Arab Saudi dari Qatar sebagai bentuk ketegasan Arab Saudi untuk menyikapi kritik yang dilontarkan Al Jazeera terhadap Arab Saudi. Arab Saudi juga membuat media berita tandingan untuk melemahkan pengaruh Al Jazeera yaitu Al Arabiya pada tahun 2003. Tahun 2013 Al Jazeera kembali mendapatkan sorotan oleh Arab Saudi. Sorotan ini ialah karena aktivitas Al Jazeera yang dinilai menyebabkan kekacauan dan konflik dalam negeri di beberapa negara-negara Timur Tengah – yang punya hubungan sangat dekat dengan Arab Saudi, tentu saja ini soal aktivitas liputan Al Jazeera selama *Arab Spring*. Selang satu tahun yaitu pada tahun 2014, Arab Saudi kembali memperingati lebih tegas kepada Al Jazeera masih dengan cara yang sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Al Jazeera masih membuat tayangan yang terkesan menyerang rezim negara-negara Timur Tengah. Namun konflik kembali terjadi pada

pertengahan tahun 2017 yang mana kali ini Arab Saudi bersikap jauh lebih tegas yaitu dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memblokir jalur yang berhubungan dengan Qatar. Al Jazeera dalam konflik ini kembali ikut menjadi sorotan Arab Saudi.

Dari paparan di atas, membuktikan bahwa Arab Saudi dan Al Jazeera didominasi hubungan yang tidak baik, bahkan sebelum *Arab Spring*. Bisa dikatakan bahwa, fenomena *Arab Spring* yang mana cukup sensitif bagi rezim-rezim negara Timur Tengah yang tidak demokratis, serta peran Al Jazeera sebagai media berita yang mendukung gerakan revolusi Arab tersebut – apalagi Al Jazeera merupakan media berita yang sudah punya pengaruh di Timur Tengah – telah menjadikan ancaman serius bagi Arab Saudi. Memang tidak menyerang secara langsung, tapi pengaruhnya cukup terasa oleh Arab Saudi, melalui negara-negara sahabat Arab Saudi yang sudah kacau karena adanya kolaborasi Al Jazeera dan *Arab Spring* itu. Porsi kekuatan regional dan keseimbangan stabilitas sistem di Timur Tengah yang dipegang oleh Arab Saudi mau tidak mau menemui lawannya.

A. Dukungan Qatar terhadap Al Jazeera

Upaya yang dilakukan oleh Arab Saudi untuk melemahkan pengaruh Al Jazeera sudah cukup bervariasi. Upaya terakhir, bisa dikatakan juga upaya paling tegas, dari Arab Saudi ialah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar – negara basis Al Jazeera. Namun, dalam hal ini perlu adanya penjelasan lebih terkait bagaimana bentuk hubungan antara Qatar dan Al Jazeera sehingga Arab Saudi harus mempertaruhkan hubungannya dengan Qatar untuk meredam Al Jazeera. Berikut di bawah akan dijelaskan terkait hubungan Qatar dan Al Jazeera dan bagaimana kaitannya dengan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017.

1. Hubungan Qatar dan Al Jazeera

Untuk melihat bagaimana bentuk hubungan antara Al Jazeera dengan Qatar, sangat mudah jika dengan menceritakan tentang pemimpin Qatar yang memiliki ide mendirikan Al Jazeera. Sehingga di bawah ini akan diceritakan secara singkat tentang Sheikh Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani. Sheikh Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani yang merupakan Emir (atau bisa dikatakan Presiden) dari Qatar merupakan pemimpin yang progresif dan cukup kontroversial. Sejak awal kelahiran Al Jazeera, Sheikh Emir Hamad memang mengharapkan sebuah media yang mirip seperti CNN (berani mengkritik dan profesional), sebuah media berita asal Amerika Serikat. Namun media tersebut harus lebih berfokus pada isu-isu yang

berhubungan langsung dengan dunia Arab serta perspektif Arab yang independen (Powers & Gilboa, 2007, hal. 55). Dalam hal ini dibuktikan dengan Sheikh Emir Hamad, yang sebagai Presiden Qatar, memberi dana awal untuk peluncuran Al Jazeera sebesar \$ 147 dan menyubsidi Al Jazeera selama lima tahun hingga November 2001 (El-Nawawy & Iskandar, 2003, hal. 34). Hal ini adalah sebagai bentuk bagian dari langkah kecil untuk memperkenalkan demokrasi ke negara kecilnya dan diharapkan bertindak dalam demokratisasi di wilayah Timur Tengah. Namun, meskipun Sheikh Emir Hamad berharap Al Jazeera menjadi mandiri secara finansial dan mendapat iklan, faktanya pemerintah Qatar telah menghabiskan sekitar \$ 100 juta setiap tahun untuk mempertahankan jaringan yang saat itu belum mendapatkan banyak iklan³.

Sheikh Emir Hamad memiliki latar belakang pendidikannya di Britania Raya, di mana ia lulus dari Royal Military Academy di Sandhurst pada tahun 1971. Sebelum mengangkat dirinya sebagai emir, Sheikh Emir Hamad aktif dalam memodernisasi baik infrastruktur militer maupun fisik dan ekonomi negara Qatar. Tahun 1977 ia diangkat sebagai Putra Mahkota, di mana ia juga ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Di bawah arahnya, pasukan militer Qatar berpartisipasi dalam serangan Koalisi terhadap Irak setelah invasi ke Kuwait pada tahun 1990. Juni 1995, beliau mengambil alih pemerintahan Qatar dengan meng kudeta (dengan damai tanpa kekerasan) ayahnya sendiri, Sheikh Khalifa. Saat itu ayahnya sedang berada di Jenewa (El-Nawawy & Iskandar, 2003, hal. 35). Setelah menjabat sebagai Emir, Sheikh Emir Hamad bahkan mengizinkan semua warga negara di atas usia delapan belas tahun, termasuk perempuan, untuk ikut menjadi pemilih di pemilihan kota. Masih banyak kebijakan-kebijakan lainnya yang menggambarkan bahwa Sheikh Emir Hamad berupaya untuk meliberalisasi sistem di Qatar. Salah satu hasil dari upaya liberalisasi Qatar oleh Sheikh Emir Hamad ialah Al Jazeera, dengan segala aktivitas dan program televisinya.

Segala bentuk hubungan pemerintah Qatar di awal, bahkan sampai selama perjalanan Al Jazeera, memang tidak dapat dipungkiri saling terkait satu sama lain. Dimulai dengan ide membeli BBC versi Arab yang ditutup oleh Arab Saudi untuk dijadikan organisasi media berita milik Qatar yang inisiatif dari Sheikh Emir Hamad, dalam hal ini pemerintah Qatar, sendiri. Namun, Al Jazeera mengatakan bahwa untuk urusan editorial secara independen di dalam wewenang dari Al Jazeera sendiri. Faisal Al Kasim, pembawa acara *The Opposite Direction*

³ Data saat itu diambil pada tahun 2003.

mengatakan bahwa kebijakan editorial Al Jazeera sangat longgar sehingga ia tidak pernah diberi perintah mengenai konten program.

Menurut Al Jazeera, mereka adalah media berita yang independen. Satu-satunya koneksi ke pemerintahan Qatar ialah soal pendanaan Qatar kepada Al Jazeera. Di luar itu, Al Jazeera independen dari segi editorial (El-Nawawy & Iskandar, 2003, hal. 43). Namun beberapa pengamat menilai bahwa Al Jazeera tidak benar-benar independen, mereka pesimis tentang hubungan Al Jazeera dengan pemerintah Qatar. Mohammed Arafa, seorang ahli komunikasi dan mantan Ketua Departemen Komunikasi Universitas Qatar mengatakan bahwa pemerintah Qatar menggunakan Al Jazeera sebagai alat *public relation* untuk berhadapan dengan dunia luar. Hal ini menjadi meyakinkan ketika mengetahui fakta bahwa Al Jazeera yang banyak mengkritik sebagian besar rezim Arab tetapi hampir tidak menyentuh politik domestik di Qatar. Seolah Al Jazeera menghindari untuk menayangkan ‘cucian kotor’ Qatar, padahal banyak hal-hal yang bisa dikritisi oleh Al Jazeera terhadap negara yang membiayainya tersebut (El-Nawawy & Iskandar, 2003, hal. 86).

Beberapa pengamat melihat Al Jazeera sebagai alat politik yang digunakan oleh pemerintah Qatar secara tidak langsung untuk melayani tujuan kebijakan luar negerinya. Hilal Khashan, seorang sarjana Palestina-Amerika terkemuka dan profesor di Departemen Studi Politik dan Administrasi Publik di American University of Beirut berkomentar bahwa Al Jazeera tidak pernah benar-benar dipahami sebagai proyek media. Al Jazeera merupakan proyek politik. Tegasnya, Al Jazeera menjadi perpanjangan tangan dari negara Qatar. Qatar menginginkan sesuatu yang dapat meningkatkan prestise dan memberikan kekuatan serta pengaruh yang kuat (Sultan, 2013). Hal ini dicurigai publik dan analisis melalui kasus perbaikan hubungan antara Qatar dan Arab Saudi yang sempat putus tahun 2002 akibat pemberitaan Al Jazeera. Disinyalir adanya negosiasi yang menggunakan pengaruh Al Jazeera untuk mendamaikan hubungan. Mustafa Alani, seorang analis keamanan di Pusat Penelitian Teluk di Dubai mengatakan bahwa sebelum perbaikan hubungan antara Qatar dan Arab Saudi, yang setelah 5 tahun merenggang, pada tahun 2007 Qatar telah bertemu pada September dengan Arab Saudi di Riyadh untuk setuju memberi jaminan kepada Arab Saudi tentang liputan Al Jazeera (Worth, 2008). Dampak dari hal ini kemudian segera terasa di Al Jazeera. Staf Al Jazeera mengakui bahwa terjadi perubahan di ruang redaksi setelah pertemuan itu. Al Jazeera tidak lagi berbicara negatif soal Arab Saudi (Worth, 2008).

Kemudian dalam kasus *Arab Spring*, Qatar memainkan peran yang besar dalam fenomena tersebut. Qatar menganggap bahwa *Arab Spring* mewakili kesempatan yang sempurna untuk menggeser keseimbangan kekuatan Timur Tengah. Karena itu para penguasa Qatar menjalankan dua strategi yaitu merajut jaringan dengan kelompok Islamis serta revolusioner dan membangun kekuatan media berita, dalam hal ini Al Jazeera (Cherkaoui, 2014). Hal ini kemudian dibuktikan dengan bagaimana Qatar berpihak pada kelompok gerakan Islamis dan revolusioner dalam peristiwa *Arab Spring* di berbagai negara-negara Arab. Sebagaimana yang sudah dibahas pada bab III, pada peristiwa Revolusi Melati di Tunisia, Qatar mendukung oposisi rezim yang saat itu diwakilkan partai *Ennahdha*. Kemudian di Mesir, Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin yang menuntut terjadinya revolusi di Mesir. Dukungan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin ini dengan bantuan dana kepada salah satu anggotanya yang terpilih sebagai presiden Mesir, yaitu Mohammad Morsi (Qassemi, 2012). Di Libya, Qatar mendukung *National Transitional Council* (NTC) yang merupakan badan pemerintahan Libya sementara sebagai tandingan bagi pemerintahan Khadafi. Dalam badan tersebut berisi pasukan dari *The Libyan Islamic Fighting Group* atau biasa dikenal sebagai *Al-Jama'ah al-Islamiyah al-Muqatilah bi-Libya*, yang merupakan kelompok Islamis bersenjata yang juga ikut terlibat dalam perang di Libya 2011. Dalam hal ini, Qatar memberikan dukungan dari segi bantuan militer kepada NTC untuk melawan pasukan militer pro pemerintahan Khadafi (Fraihat, 2011). Dalam hal ini Qatar telah menjalankan strateginya yaitu menjalin hubungan dengan kelompok revolusioner dan Islamis di negara-negara yang kala itu tengah berada pada krisis stabilitas politik. Kebijakan luar negeri Qatar bisa dikatakan lebih agresif saat merespons peristiwa *Arab Spring*, jika dibandingkan dengan kebijakan yang diambil pada peristiwa lain. Qatar yang sebelumnya memosisikan dirinya sebagai mediator pelera konflik di antara beberapa kasus antar negara atau antar kelompok, berubah menjadi negara yang terlibat dalam konflik itu sendiri, khususnya dalam hal ini peristiwa *Arab Spring* (Khatib, 2013).

Dalam konteks strategi Qatar dalam *Arab Spring*, selain menjalin relasi dengan kelompok revolusioner dan kelompok Islamis seperti dijelaskan di atas, Qatar juga membangun kekuatan media. Hal tersebut dijelaskan dengan bagaimana Al Jazeera mengcover peristiwa *Arab Spring*. Fadi Salem, seorang peneliti media Arab yang berbasis di Dubai, mengatakan pada saat *Arab Spring* 2011, liputan Al Jazeera di Kairo, Tunis, dan Tripoli terlihat menunjukkan protes-protes masyarakat yang ingin menggulingkan pemimpinnya seperti Hosni Mubarak dari Mesir, Zine El Abidine Ben Ali dari Tunisia, dan Muammar Khadafi di Libya (Shane, 2013). Al Jazeera menyadari bahwa belum ada media yang berani membawa

kekacauan sosial dan politik di Timur Tengah ke mata dunia. Terlebih sudut pandang yang ditawarkan Al Jazeera telah berani melawan sudut pandang pemerintah yang kesannya menganggap *Arab Spring* bukan sebagai pendewasaan politik masyarakat, melainkan pembangkangan rakyat terhadap pemerintahnya. Sehingga dalam hal ini, Al Jazeera menjadi media kuat. Keinginan menjadikan Al Jazeera sebagai media yang kuat bukan hanya keinginan Al Jazeera, melainkan juga keinginan pemerintah Qatar. Kekuatan Al Jazeera yang telah terkumpul dari 15 tahun sebelum *Arab Spring* menjadi modal bagi pemerintah Qatar dalam menegaskan posisinya dalam kawasan Timur Tengah. Keinginan pemerintah Qatar terhadap kuatnya Al Jazeera sebenarnya telah tergambar dari bagaimana pemerintah Qatar sejak awal berdrinya Al Jazeera tidak memberikan batasan bagi Al Jazeera untuk bergerak, yaitu dengan menghilangkan kewenangan pemerintah untuk melakukan sensor terhadap liputan-liputan Al Jazeera.

Hubungan antara Qatar dan Al Jazeera semakin menarik ketika Al Jazeera terlihat seperti menyelaraskan kebijakan luar negeri Qatar dalam konteks keberpihakannya di peristiwa *Arab Spring*. Ketika Qatar mengarahkan kebijakan luar negerinya selama *Arab Spring* untuk mendukung oposisi pemerintah salah satunya Ikhwanul Muslimin, Al Jazeera di segmen lainnya juga ikut berpihak kepada Ikhwanul Muslimin. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya liputan Al Jazeera terkait Ikhwanul Muslimin selama *Arab Spring*. Terutama ketika Ikhwanul Muslimin mengundatkan Mohammad Morsi sebagai Presiden Mesir. Bahkan ketika Mohammad Morsi telah terpilih sebagai presiden, Al Jazeera banyak membuat laporan berita yang seolah memuji Morsi (Qassemi, 2012). Pasca pelantikan Morsi sebagai presiden, Emir Qatar menjadi orang pertama yang memberikan selamat kepadanya. Hal-hal ini bisa diasumsikan ke dalam banyak hal. Bisa diasumsikan bahwa Qatar dan Ikhwanul Muslimin memiliki hubungan baik, yang mana hal ini memenuhi strategi kebijakan luar negeri Qatar yaitu membuat jaringan dengan kelompok Islamis. Asumsi berikutnya ialah bahwa liputan Al Jazeera dalam peristiwa *Arab Spring* menyelaraskan kebijakan luar negeri Qatar dengan berpihak pada kelompok Islamis melalui liputannya. Pemerintah Qatar sendiri tidak berkomentar apa pun soal keberpihakan Al Jazeera kepada kelompok Islamis (karena memang itu yang diharapkan oleh pemerintah Qatar), sehingga secara tidak langsung pemerintah Qatar telah mendukung – bahkan bisa dibilang mendorong – liputan-liputan Al Jazeera dalam *Arab Spring*. Semenjak saat itu para analis melihat adanya perubahan besar dalam editorial Al Jazeera, yang mana ini dikatakan sebagai *turning point* Al Jazeera (Seib, 2017). Salem mengatakan bahwa Al Jazeera tidak lagi menjadi suara perlawanan Arab, malah menjadi

bagian dari kelompok Islamis dan bagian dari kebijakan luar negeri Qatar. Bagaimanapun asumsi terkait hubungan Al Jazeera dan Qatar yang membawa mereka pada hubungan ‘budak dan majikan’, jelas dibantah oleh berbagai pihak. Baik dari Al Jazeera maupun dari pemerintah Qatar.

Meski pihak Qatar maupun Al Jazeera menafikan asumsi-asumsi tersebut, Arab Saudi (bersama dengan anggota GCC lainnya) tetap mencurigai Qatar yang menggunakan Al Jazeera sebagai alat propaganda. Hal ini kemudian menjadi salah satu alasan yang mendorong Arab Saudi dan anggota GCC lainnya mempertegas sikap mereka terhadap Qatar. Mereka, tentu saja dalam komando Arab Saudi, menilai bahwa Al Jazeera hanya menjadi platform untuk mempromosikan kebijakan luar negeri Qatar, yang dalam pandangan mereka kebijakan luar negeri itu bertentangan dengan mereka (TheEconomist, 2017). Hingga puncaknya ialah mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar tahun 2017.

2. Al Jazeera dalam Riyadh Agreement 2013/2014

Memilih jalur berbeda memang tidak mudah dan tanpa hambatan. Begitu pula Al Jazeera, yang bahkan sejak kelahirannya sudah mengidentifikasi dirinya sebagai media berita yang berbeda dari media-media arus utama di Timur Tengah kala itu. Menghancurkan batas-batas dalam jurnalisme, menghantarkan pada contoh jurnalisme profesional. Memberikan ruang pada isu-isu tabu untuk diangkat kepada publik yang butuh disadarkan dan dicerdaskan. Menjadi beda sendiri, yang paling berani dan paling mewakili. Hingga akhirnya Al Jazeera pun mau tidak mau harus berhadapan juga dengan pemerintah negara-negara Arab yang sangat menjaga kultur tradisionalisme konservatif serta kontra-revolusi salah satunya yaitu Arab Saudi.

Pada tahun 2017 Arab Saudi dan anggota GCC yang berada di pihaknya menindak tegas Qatar dengan memutuskan hubungan diplomatik masal dan menarik konsuler pada 5 Juni 2017, sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab III. Melalui situs pers resmi Saudi Press Agency, pemerintah Arab Saudi menjelaskan alasannya ialah Qatar sudah melakukan pelanggaran berat selama beberapa tahun terakhir terhadap komitmennya, dengan tujuan untuk memecahkan stabilitas domestik dan melanggar kedaulatan Arab Saudi. Arab Saudi menilai Qatar telah membahayakan stabilitas di kawasan Teluk Arab dengan merangkul banyak teroris dan kelompok sektarian – seperti Ikhwanul Muslimin, ISIS, dan Al-Qaeda – kemudian mempromosikan kelompok tersebut melalui media, serta menggunakan media berita tersebut untuk menyulut hasutan-hasutan di internal yang membuat kekacauan di dalam negeri Arab

Saudi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keamanannya nasionalnya dari bahaya terorisme dan ekstremisme yang mana dilakukan oleh Qatar, sebagaimana yang sudah sering dituduhkan Arab Saudi kepada Qatar.

Berdasarkan pemaparan dari Arab Saudi di atas banyak alasan mengapa akhirnya Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik secara tegas dengan Qatar. Namun yang cukup menarik dari pemaparan alasan tersebut ialah singgungan Arab Saudi soal komitmen Qatar terhadap Riyadh Agreement – yang mana memiliki kisah sendiri dibaliknya – dan penggunaan media oleh Qatar yang membuat hasutan-hasutan pada internal Arab Saudi. Penulis menemukan bahwa Riyadh Agreement tersebut memiliki kaitannya dengan penyebab terjadinya krisis diplomatik Qatar tahun 2017, serta penolakan Arab Saudi terhadap media berita Al Jazeera. Sehingga penulis akan membahas perihal Riyadh Agreement dan kaitannya dengan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar serta bagaimana posisi Al Jazeera di dalamnya.

Tahun 2017, sebulan setelah pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar, muncul sebuah berita dari CNN yang membocorkan dokumen rahasia yang disinyalir bahwa dokumen tersebut yang mampu menjelaskan krisis diplomatik 2017 yang dialami oleh Qatar. Karena dokumen ini tertanggal 2013 dan 2014, maka mau tidak mau kita harus bergerak mundur terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam tulisan yang dirilis oleh CNN di situs resminya pada tanggal 11 Juli 2017, mereka mengatakan bahwa dokumen tersebut merupakan sebuah perjanjian rahasia tentang kesepakatan menjaga stabilitas sesama negara teluk yang dibuat antara negara-negara GCC – diprakarsai oleh Arab Saudi – dengan Qatar tahun 2013 dan 2014 (Sciutto & Herb, 2017). Nama kesepakatan tersebut ialah Riyadh Agreement 2013 dan Riyadh Agreement 2014. Dimulai pada November 2013, Arab Saudi dan Qatar, bersama Kuwait, membuat sebuah kesepakatan tertulis tentang beberapa hal. Perjanjian ini mulanya hanya ditulis dengan tangan yang kemudian langsung ditandatangani oleh ketiganya. Perjanjian ini juga tertulis dengan bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan oleh CNN dengan bahasa Inggris dan tertanggal 23 November 2013⁴. CNN telah menyertakan foto duplikat dokumen perjanjian tersebut di dalam tulisan berita yang berjudul “Exclusive: The Secret Documents that Help Explain the Qatar Crisis”.

⁴ Diunduh melalui <https://i2.cdn.turner.com/cnn/2017/images/07/10/translation.of.agreementsupdated.pdf>, akses pada tanggal 4 Oktober 2019

Kemudian satu tahun setelah perjanjian tersebut dibentuk dan ditandatangani, tahun 2014 Arab Saudi menanggukuhkan hubungan diplomatik dengan Qatar yang ditandai dengan pemanggilan duta besar Arab Saudi dari Qatar. Pemutusan hubungan diplomatik ini dikarenakan Qatar tidak mampu berkomitmen terhadap kesepakatan yang telah ditandatangani (Yehoshua, Admon, & Hoffman, 2014). Berbeda dengan ketegangan hubungan di tahun 2002, kali ini ketegangan juga terjadi antara Qatar dan beberapa negara GCC lainnya yaitu Bahrain dan Uni Emirat Arab secara bersamaan. Kemudian delapan bulan setelah pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar tahun 2014 terjadi, Arab Saudi kembali menjalin hubungan diplomatik dengan Qatar pada November 2014. Dalam dokumen rahasia yang tercatat tanggal 16 November 2014, Arab Saudi dan Qatar kembali membuat kesepakatan, lebih tepatnya, memperbaharui kesepakatan. Bisa dipastikan kembalinya hubungan Arab Saudi dan Qatar ialah setelah penandatanganan Riyadh Agreement yang telah diperbaharui. Kali ini ditandatangani oleh Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Dalam perjanjian ini tertulis bahwa Arab Saudi mengundang negara-negara tersebut untuk menandatangani Riyadh Agreement 2014 (Sciutto & Herb, 2017). Isi dari perjanjian tersebut hanya menegaskan apa yang telah disebutkan dalam Riyadh Agreement 2013, namun dengan beberapa tambahan.

Setelah itu, karena lagi-lagi Qatar gagal memenuhi komitmen yang sudah dibuat, terjadilah pemutusan hubungan diplomatik besar-besaran tahun 2017. Ketika terjadi keretakan hubungan yang terakhir, Qatar dinilai memosisikan dirinya sebagai korban karena tetangga-tetangganya seolah mengasingkannya. Bahkan Qatar menafikan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu Arab Saudi merasa penting menyadarkan Qatar atas apa kesalahannya dengan membocorkan dokumen rahasia perjanjian antara Arab Saudi dan Qatar (Alkhereiji, 2017).

Isi dari kedua perjanjian ini sebenarnya mirip dengan alasan-alasan Arab Saudi mengapa memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar tahun 2017. Terutama terkait media berita, dalam hal ini Al Jazeera, yang pada tahun 2017 Arab Saudi menuntut Qatar untuk menutupnya. Perjanjian ini kemudian memperlihatkan bahwa Al Jazeera berada di tengah-tengah krisis hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Qatar. Dalam Riyadh Agreement 2013 Arab Saudi dan pendukungnya menyinggung media berita Qatar yang disebut dengan “antagonistic media”. Dari berbagai pendapat analisis, maksud dari “antagonistic media” tersebut merujuk pada Al Jazeera. Sementara di Riyadh Agreement 2014 nama Al Jazeera disebut secara terang-terangan sebagai media yang telah melakukan pelanggaran. Bahkan

secara spesifik dalam Riyadh Agreement 2014 disebutkan bahwa Al Jazeera diminta untuk menghentikan segala aktivitasnya di negara lain – khususnya Mesir – karena dinilai telah menyerang negara tersebut. Aktivitas Al Jazeera yang dinilai sebagai bentuk serangan ialah liputannya terhadap gejolak politik Mesir dari tahun 2011 hingga tahun 2013 (saat kudeta terhadap Presiden Mohammad Morsi), baik liputan dalam bentuk siaran televisi maupun berita di situs resminya. Termasuk aktivitas saluran khusus Al Jazeera untuk Mesir yaitu Al Jazeera Mubasher Misr (AJMM). Dalam Riyadh Agreement 2014, secara khusus disebutkan bahwa Arab Saudi dan pendukungnya meminta saluran AJMM (saluran khusus Al Jazeera untuk menyiarkan apa yang terjadi di Mesir secara langsung) untuk dihentikan. Selang satu bulan setelah penandatanganan Riyadh Agreement 2014 pada November 2014, melalui situs pr.aljazeera.com, Al Jazeera Media Network pun membekukan izin siaran AJMM pada tanggal 22 Desember 2014 (Al-Jazeera, 2014) (BBC, 2014). Kemudian, setelah memutuskan vakumnya Al Jazeera Mubasher Misr, Al Jazeera kemudian membuat format baru dari Al Jazeera Mubasher yaitu Al Jazeera Mubasher Al-‘Amma yang peliputannya lebih umum.

Keberadaan Al Jazeera di tengah krisis diplomatik Qatar seperti disebutkan di atas, merupakan konsekuensi dari dua hal yang saling berkaitan, yang pertama ialah perannya sebagai *agenda-setting agent*, kedua ialah dukungan Qatar terhadap aktivitas Al Jazeera, keduanya terkhusus dalam konteks kejadian selama *Arab Spring*. Al Jazeera memberikan ruang luas terhadap isu revolusi Arab 2011 atau *Arab Spring* untuk menjadi perhatian publik, baik melalui siaran berita dan program debat di televisi, maupun situs berita *online* Al Jazeera. Arab Saudi – sebagai negara yang kontra-revolusi – memandang aktivitas Al Jazeera tersebut sebagai ancaman bagi negaranya. Liputan Al Jazeera terkait dengan *Arab Spring* bisa berdampak pada gejolak sosial di dalam negara Arab Saudi. Ketakutan dirasakan Arab Saudi terkait posisinya sebagai kekuatan regional di Timur Tengah akan terancam dengan hadirnya kekuatan pengaruh baru seperti Al Jazeera. Dalam hal ini ialah kekuatan yang dimiliki oleh Al Jazeera dalam memengaruhi opini publik Timur Tengah, yang mana harusnya berada pada kendali Arab Saudi dan rezim-rezim pemerintahan negara Timur Tengah pendukung Arab Saudi.

Aktivitas tersebut semakin membuat rumit hubungan Arab Saudi dan Qatar karena isu *Arab Spring* yang diangkat oleh Al Jazeera berkaitan hubungannya dengan kebijakan luar negeri Qatar. Di sini kemudian masuk poin kedua yaitu dukungan Qatar terhadap aktivitas Al Jazeera. Arab Saudi – yang merupakan negara dengan dominasinya di regional Timur Tengah – curiga terhadap Qatar bahwa dia menggunakan Al Jazeera hanya untuk kepentingan Qatar,

hal tersebut cukup mengancam posisi Arab Saudi di Timur Tengah. Karena rasa terancam tersebut, Arab Saudi meminta Qatar untuk membuat kesepakatan yang disebut di atas sebagai Riyadh Agreement. Alasan Arab Saudi dalam hal ini tidak terlepas dari bagaimana hubungan yang terjalin antara Qatar dan Al Jazeera. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan antara Qatar dan Al Jazeera sangat dalam. Pemerintah Qatar bertanggungjawab dibalik pendirian Al Jazeera pada tahun 1996, termasuk dalam pendanaan untuk aktivitas operasionalnya. Namun, hubungan dekat Qatar dan Al Jazeera nyatanya tidak mampu menjadi modal bagi Arab Saudi untuk membendung aktivitas Al Jazeera yang dinilai berbahaya bagi Arab Saudi. Kegagalan Qatar, atau bisa dikatakan keengganan, untuk menjaga komitmen terhadap Riyadh Agreement ialah bukti bahwa Qatar masih berupaya untuk menjaga independensinya dalam membuat kebijakan. Independensi Qatar dalam kebijakannya, terutama kebijakan luar negeri, sudah jelas menyiratkan bahwa Qatar hendak lepas dari pengaruh Arab Saudi terhadap keputusan yang diambilnya. Termasuk keputusannya membuat media berita dengan arah gerak yang independen tanpa kontrol pemerintah negara, sebagaimana kebanyakan media di Timur Tengah, yang salah satunya dikontrol oleh Arab Saudi.

Selama *Arab Spring* perbedaan kebijakan luar negeri Qatar dengan Arab Saudi terlihat. Qatar mendukung gerakan revolusioner di negara terdampak *Arab Spring*, sedang Arab Saudi mendukung rezim pemerintahan negara terkait. Al Jazeera yang merupakan media berita yang berpihak pada publik – tapi juga didanai Qatar – sudut pandang yang digunakan pada liputan mereka dalam *Arab Spring* ialah para demonstran, kelompok oposisi, bahkan kelompok Islamis, yang mana mereka ialah suara yang belum pernah diperjuangkan media-media berita tradisional. Sehingga dalam hal ini, ada keselarasan antara Qatar dan Al Jazeera. Tidak seperti negara-negara Timur Tengah lain yang akan membungkam media dengan model seperti Al Jazeera, Qatar malah membiarkannya dan masih membela kala Al Jazeera dituduhkan bermacam-macam hal. Dari sini, perlakuan Saudi terhadap Qatar (sejak Riyadh Agreement 2013 hingga Krisis Diplomatik 2017) menjadi beralasan, dan Al Jazeera berada di tengah-tengahnya.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, kesimpulannya ialah Qatar tidak mengindahkan tuntutan dari Arab Saudi – bersama dengan anggota GCC lainnya – yang sudah tertera dalam Riyadh Agreement 2013 dan 2014. Perjanjian tersebut sudah disepakati, namun Qatar tidak berkomitmen dengan sungguh-sungguh menjalankan poin-poin dari perjanjian tersebut. Terutama terkait dengan media berita milik Qatar, yaitu Al Jazeera, yang dinilai berbahaya oleh Arab Saudi. Qatar dinilai tidak punya niatan untuk mengontrol media berita tersebut agar tidak mengganggu kedaulatan dan keamanan negara lain di Timur Tengah. Apalagi dalam masa *Arab Spring*, yang mana Arab Saudi hendak menghentikan narasi tentang revolusi Arab yang mengancam dirinya, Qatar malah mendukung gerakan revolusi. Bersamaan dengan itu, Al Jazeera menjalankan peran *agenda-setting agent* yang menekankan pada isu revolusi Arab. Kolaborasi antara Qatar – yang mendirikan Al Jazeera – dan Al Jazeera yang populer dan punya pengaruh besar dalam hal membuat opini publik, bersama-sama berada di pihak yang dimusuhi oleh Arab Saudi. Sehingga dalam hal ini Arab Saudi memperingatkan Qatar dengan berbagai tuntutan dalam perjanjian, bahkan pada puncaknya menghindari Qatar dengan memutuskan hubungan diplomatik terhadap Qatar. Sehingga dalam hal ini, peran Al Jazeera dalam pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar tahun 2017 ialah adanya peran *agenda-setting agent* Al Jazeera yang menekankan isu revolusi Arab selama *Arab Spring* dan adanya dukungan Qatar terhadap aktivitas serta peran Al Jazeera tersebut, yaitu berupa pembebasan yang diberikan Qatar terhadap segala aktivitas Al Jazeera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelmoula, E. (2015). *Al Jazeera and Democratization The rise of the Arab public sphere*. New York: Routledge.
- Alaraby. (2017, Juni 22). *Veteran Saudi presenter resigns from Al-Jazeera Arabic to conform with kingdom's anti-Qatar offensive*. Diambil kembali dari The New Arab: <https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/6/22/conforming-with-governments-line-saudi-presenter-resigns-from-al-jazeera>
- Al-Jazeera. (2014, Desember 22). *Changes for Al Jazeera Mubasher channels*. Diambil kembali dari Al Jazeera Media Network: Al Jazeera PR: <https://pr.aljazeera.com/post/105871768275/changes-for-al-jazeera-mubasher-channels>
- Al-Jazeera. (2017, November 27). *Qatar-Gulf crisis: How it all got started on June 5*. Diambil kembali dari Al-Jazeera News: <https://www.aljazeera.com/news/2017/11/qatar-gulf-crisis-started-june-5-171122105507731.html>
- Al-Jazeera. (2017, Juni 9). *Saudi Arabia Bans Al Jazeera Channels in Hotels*. Diambil kembali dari Al Jazeera News: Qatar: <https://www.aljazeera.com/news/2017/06/saudi-arabia-bans-al-jazeera-channels-hotels-170609141041079.html>
- Al-Jazeera. (2019). *About Us: What We Stand For*. Diambil kembali dari Al Jazeera Media Network: <https://network.aljazeera.com/about-us/our-values>
- Alkhereiji, M. (2017, Juli 16). *2013 GCC documents shed light on current Qatar dispute*. Diambil kembali dari TheArabWeeklyThe Arab Weekly: <https://thearabweekly.com/2013-gcc-documents-shed-light-current-qatar-dispute>
- BBC. (2002, September 30). *Saudi envoy recalled from Qatar*. Diambil kembali dari BBC News World Edition: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2287695.stm
- BBC. (2011, Januari 23). *Man dies after setting himself on fire in Saudi Arabia*. Diambil kembali dari BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-12260465>
- BBC. (2014, Desember 23). *Al-Jazeera suspends Egyptian channel Mubasher Misr*. Diambil kembali dari BBC News World: Middle East: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-30585551>
- Centerpeace.org. (2019, September 22). *Arab Peace Initiative*. Diambil kembali dari S. Daniel Abraham Center for Middle East Peace: <https://centerpeace.org/explore/Arab-peace-initiative/>
- Cherkaoui, T. (2014). *Al Jazeera's Changing Editorial Perspectives and the Saudi-Qatari Relationship*. Diambil kembali dari The Political Economy of Communication: <http://www.polecom.org/index.php/polecom/article/view/28/205>
- Cherribi, S. (2017). *Fridays of Rage Al Jazeera, the Arab Spring, and Political Islam*. New York: Oxford University Press.
- El-Nawawy, M., & Iskandar, A. (2003). *Al-Jazeera: The Story of the Network That Is Rattling Governments and Redefining Modern Journalism*. Cambridge: Westview Press.

- Fraihat, I. (2011, Agustus 29). *What Tiny Qatar Stands to Gain in Libya*. Diambil kembali dari Brookings: <https://www.brookings.edu/on-the-record/what-tiny-qatar-stands-to-gain-in-libya/>
- Harb, M., & Batrawy, A. (2017, Juni 10). *Al-Jazeera a target in Gulf confrontation with Qatar*. Diambil kembali dari AP News: <https://apnews.com/854b5ce82eb9467db8298d37e110d44d>
- Hroub, K. (2011, Oktober 20). *Al Jazeera: the source of Arab springs*. Diambil kembali dari ABC Religion & Ethics: <https://www.abc.net.au/religion/al-jazeera-the-source-of-arab-springs/10101074>
- Khatib, L. (2013). Qatar's Foreign Policy: The Limits of Pragmatism. *International Affairs*, 417-431.
- Lacroix, S. (2014). *Saudi Islamists and the Arab Spring*. London: Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States.
- Livingston, S. (1997). *CLARIFYING THE CNN EFFECT: An Examination of Media Effects According to Type of Military Intervention*. Cambridge: The Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy John F. Kennedy School of Government Harvard University .
- lorientlejour.com. (2002, Juli 25). *GOLFE Al-Jazira déclenche une crise larvée entre Ryad et Doha*. Diambil kembali dari lorientlejour: https://www.lorientlejour.com/article/381180/GOLFE_Al-Jazira_declenche_une_crise_larvee__entre_Ryad_et_Doha.html
- Miles, H. (2011, Februari 09). *Foreign Policy: The Al-Jazeera Effect*. Diambil kembali dari npr: <https://www.npr.org/2011/02/09/133615792/foreign-policy-the-al-jazeera-effect>
- Nawawi, H. (1995). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Powers, S. (2009). *The Geopolitics of the News: The Case of the Al Jazeera Network*. California: University of Southern California.
- Powers, S., & Gilboa, E. (2007). The Public Diplomacy of Al Jazeera. Dalam P. Seib, *New Media and the New Middle East* (hal. 55). New York: Palgrave Macmillan.
- Qassemi, S. S. (2012, Juli 01). *Morsi's Win Is Al Jazeera's Loss*. Diambil kembali dari Al Monitor: <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2012/al-monitor/morsys-win-is-al-jazeeras-loss.html>
- Richter, T. (2014). Saudi Arabia: A Conservative P(1)ayer on the Retreat? Dalam H. Fürtig, *Regional Powers in the Middle East: New Constellations after the Arab Revolts* (hal. 177). New York: Palgrave Macmillan.
- Rushing, J. (2007). *Mission Al Jazeera*. New York: Palgrave Macmillan.
- Sciutto, J., & Herb, J. (2017, Juli 11). *Exclusive: The secret documents that help explain the Qatar crisis*. Diambil kembali dari CNN Politics: <https://edition.cnn.com/2017/07/10/politics/secret-documents-qatar-crisis-gulf-saudi/index.html>

- Seib, P. (2017, Juli 10). *Why some Arab countries want to shutter Al Jazeera*. Diambil kembali dari The Conversation: <https://theconversation.com/why-some-arab-countries-want-to-shutter-al-jazeera-80600>
- Shane, D. (2013, Juli 27). *The rise and fall of Al Jazeera*. Diambil kembali dari Arab Business: <https://www.arabianbusiness.com/the-rise-fall-of-al-jazeera-511108.html>
- Sultan, N. (2013). Al Jazeera: Reflections on the Arab Spring . *Journal of Arabian Studies: Arabia, the Gulf, and the Red Sea*, 249-264.
- TheEconomist. (2017, July 01). *Why Al Jazeera is under threat*. Diambil kembali dari The Economist: Changing the Channel: <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/07/01/why-al-jazeera-is-under-threat>
- Worth, R. F. (2008, Januari 04). *Al Jazeera no longer nips at Saudis*. Diambil kembali dari The New York Times: Africa: <https://www.nytimes.com/2008/01/04/world/africa/04iht-04jazeera.9019066.html?module=ArrowsNav&contentCollection=Africa&action=keypress®ion=FixedLeft&pgtype=article>
- Yehoshua, Y., Admon, Y., & Hoffman, R. (2014, Maret 14). *Unprecedented Tension Between Qatar And Saudi Arabia/UAE/Bahrain Threatens To Break Up Gulf Cooperation Council*. Diambil kembali dari MEMRI: The Middle East Media Research Institute: <https://www.memri.org/reports/unprecedented-tension-between-qatar-and-saudi-arabiauae-bahrain-threatens-break-gulf>
- Zayani, M. (2005). Introduction—Al Jazeera and the Vicissitudes of the New Arab Mediascape . Dalam M. Zayani, *The Al Jazeera Phenomenon Critical Perspectives on New Arab Media* (hal. 4). London: Pluto Press.